

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN ANTARNEGARA DI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Rohani Manurung

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is how to implement the Economic Development Policy for Inter-State Border Areas in PKSN Bengkalis, Bengkalis Regency, Riau Province. The aim and purpose of conducting research is to find out the supporting factors and obstacles as well as strategies for economic development in PKSN Bengkalis. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. This means that the data collected is not in the form of numerical data, but data that comes from interview scripts, field notes, personal documents, researcher notes or memos and other supporting official documents. The informants in this research were 5 people from the National Border Management Agency, the Governance Section of the Regional Secretariat of Bengkalis Regency, and the Bengkalis Community. From the results of the research, conclusions were drawn, namely: (1) factors that support economic development in inter-state border areas in PKSN Bengkalis, Bengkalis Regency, namely seen from the regional planning process, synchronization between the Central Government and Regional Government regarding how economic development is based on potential and infrastructure. which is good in supporting economic development in the area that runs well. (2) obstacles in economic development in inter-state border areas in PKSN Bengkalis, Bengkalis Regency, among others, not yet optimal use of information technology, not yet optimal supporting facilities and infrastructure, weak regulatory system that supports strengthening the people's economy, weak regulatory system that encourages investment, not yet the effectiveness of trade cooperation between countries, and the continued dependence of border communities on neighboring countries. (3) The strategies that need to be implemented to develop the economy of border areas between countries in PKSN Bengkalis, Bengkalis Regency are, among other things, conducting annual evaluations as an effort to address existing obstacles to economic development, conducting studies in order to find solutions to existing problems, and carrying out innovation as a form of effort to minimize obstacles that occur in economic development.

Keywords: *Economic Development, Border Areas, National Strategic Area Center*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan AntarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan serta strategi apa dalam pengembangan ekonomi di PKSN Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang

berasal dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis Bengkalis, dan Masyarakat Bengkalis. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) faktor yang mendukung dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antarNegara di PKS N Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu dilihat dari proses perencanaan wilayah, sinkronisasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap bagaimana pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sarana prasarana yang baik dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan tersebut berjalan dengan baik. (2) hambatan dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antarNegara di PKS N Bengkalis Kabupaten Bengkalis, antara lain, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya sistem regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, lemahnya sistem regulasi yang mendorong investasi, belum efektifnya kerja sama perdagangan antar Negara, dan masih adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga. (3) Strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKS N Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah, antara lain dengan melakukan evaluasi tahunan sebagai upaya menjawab hambatan yang ada pada pengembangan ekonomi, melakukan kajian dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, serta melakukan inovasi sebagai bentuk upaya meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pengembangan ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi, Wilayah Perbatasan, Pusat Kawasan Strategis Nasional

PEDAHULUAN

Percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yang notabene perbatasan negara salah satu darinya, sampai saat ini realita memperlihatkan bahwa keterbelakangan, keterisolasian dan kemiskinan struktural melekat pada kawasan perbatasan negara. Disamping itu, ancaman kedaulatan bangsa dan gangguan keamanan di perbatasan juga menjadi isu krusial nasional. Globalisasi dan regionalisasi baik secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap Indonesia baik sebagai objek maupun subjek, termasuk perbatasan negara yang salah satu bentuknya adalah efek dari pasar bebas. Hal ini dikarenakan kawasan ini sangat mudah mendapatkan pengaruh dari pihak luar karena berakses langsung dari negara tetangga.

Permasalahan lain di wilayah perbatasan adalah disparitas pembangunan antara kawasan cepat tumbuh di dalam negeri juga luar negeri (Malaysia) dengan wilayah dan kawasan cepat perbatasan negara sangat mencolok. Padahal, fakta memperlihatkan bahwa potensi yang dimiliki di kawasan perbatasan sangat besar dan beragam mencakup sumber daya alam seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sumber daya manusia belum dikelola secara optimal.

Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dinyatakan bahwa sasaran-sasaran

pokok pembangunan 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;
2. Menurunnya kegiatan ilegal (transboundary crimes) dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

Marwasta (2016:2), menyatakan upaya mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, dan menggunakan pendekatan yang bersifat kesejahteraan. Dua pendekatan tersebut tidak lepas dari fungsi pelayanan pemerintahan. Dari segi keamanan, Pemerintah telah berkomitmen pada serangkaian norma hukum dan

operasional yang terkait dengan masalah pengelolaan perbatasan. Peran ideal pemerintah dari sisi kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Namun, manajemen perbatasan wilayah baik antar daerah maupun antarnegara selama ini lebih banyak dipahami dari perspektif keamanan (*security approach*) khususnya manajemen perbatasan di negara-negara maju. Isu-isu tentang perbatasan (wilayah negara) lebih dengan nilai dan kepentingan politik sehingga persoalan-persoalan pengelolaan perbatasan selama ini lebih banyak diselesaikan melalui pendekatan politik dan didukung oleh pendekatan keamanan.

Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana serta kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan faktor penghambat tumbuh dan kembangnya kawasan perbatasan. Pemerintah dalam hal ini anggota dari BNPP telah menyadari berbagai permasalahan dan peluang di atas. Maka salah satu bukti perhatian pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang selanjutnya mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan

Nasional pengelola Perbatasan, merupakan momentum yang perlu disambut dan didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemda, swasta, maupun stakeholder yang lain. Akan tetapi, meskipun BNPP yang berumur 13 tahun telah melakukan sejumlah kebijakan dan program-program percepatan pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara, namun harus diakui berbagai macam kegiatan tersebut masih dinilai belum maksimal.

Sesuai rencana Induk pengelolaan perbatasan Negara 2020-2024 telah ditetapkan Lokasi 8 PKSN Laut salah satunya adalah di PKSN Bengkalis sebagai salah satu instrumen kebijakan yang lebih operasional, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan Negara.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pusat Kegiatan Strategis Nasional ditetapkan dengan kriteria sebagai Pusat Perkotaan yang:

- a. berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga;
- b. berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga
- c. merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ atau
- d. merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Masalah yang harus diperhatikan tidak hanya pembangunan infrastruktur, akan tetapi ada beberapa sektor yang bisa menjadi sumber permasalahan seperti pengelolaan lintas batas yang memiliki 4 aspek, yaitu lintas batas ekonomi, lintas batas pengamanan dan pengawasan, lintas sosial-budaya dan lintas sarana dan prasarana. Pada aspek lintas ekonomi biasanya terjadi permasalahan pada perdagangan antar negara, lalu pada aspek lintas pengamanan dan pengawasan yaitu maraknya kegiatan lokasi prioritas (*fishing, entry, logging, human trafficking*, dan lainnya), yang dimana terjadi karena kurangnya pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Dari segi sosial-budaya belum optimalnya pencatatan penduduk sehingga terjadi fenomena pencampuran penduduk satu rumpun di lokasi prioritas.

Perhatian pembangunan pada daerah terluar/terdepan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, akan diimplementasikan melalui pengelolaan/pemberdayaan pulau-pulau terluar dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi unggulan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil terluar di wilayah Republik Indonesia dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang berlaku di masing-masing lokasi pengembangan.

Salah satu nilai tambah untuk menambah nilai ekonomi di PKS N Bengkalis di Provinsi Riau dengan cara memberikan edukasi tentang ekonomi kreatif, yang dimana menjadi satu faktor di era digital saat ini ekonomi kreatif bisa juga menjadi peluang untuk menumbuhkan nilai ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu fenomena dimana seseorang menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk barang ataupun jasa yang memiliki nilai ekonomi. Beberapa tokoh memberikan teori tentang ekonomi kreatif seperti, Jophn Howkins yang mendefinisikan kreativitas adalah ide, gagasan, imajinasi, dan mimpi yang dituangkan dalam bentuk produk-produk yang dapat diperdagangkan. Ada juga teori dari Thedoe Levit yang mendefinisikan kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, yang pada hakikatnya kreativitas menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada atau memperbaharui kembali suatu yang telah ada.

Pemerintah telah menyadari berbagai permasalahan dan peluang di atas, maka salah satu bukti perhatian pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang selanjutnya mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, merupakan momentum yang perlu

disambut dan didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat, pemda, swasta, maupun stakeholder yang lain.

Fokus penelitian pada PKS N Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan perkotaan sebagai salah satu kabupaten yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.628,05 km² dan berpenduduk sebanyak 593.397 jiwa dan ibu kota kabupaten berada di kecamatan Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, yang berada di kecamatan Mandau.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Tanah di sepanjang pantai di Kabupaten Bengkalis kepemilikannya sudah banyak dibeli oleh pengusaha dan warga negara asing (WNA) dari Singapura dan Malaysia. Hal ini dapat berdampak pada pembangunan jangka 85 panjang, bahkan bisa suatu hari pribumi atau penduduk setempat bisa saja tergusur (Al Hafis, 2018). Hal ini tentu sangat diluar dugaan dan sangat disesalkan hal seperti ini bisa terjadi. Tanah di wilayah perbatasan seolah-olah mudah untuk diperjualbelikan kepada warga asing terlebih jika pengawasan dari pemerintah minim.

Secara umum masyarakat di daerah perbatasan baik wilayah batas darat maupun batas wilayah laut masih terisolir dan kondisisosial ekonomi sangat tertinggal jika di bandingkan dengan kondisi masyarakat di negara tetangga Indonesia (Puteri, 2021). Potensi sumber daya alam di wilayah-

wilayah tersebut cukup besar dan berlimpah, namun kondisi infrastruktur dasar diwilayahwilayah perbatasan darat negara tersebut masih masih sangat minim (Mubarak, 2021b; Puteri, 2021; Widodo & Winarti, 2020), serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah-wilayah perbatasan darat dan laut negara yang masih rendah (Nur, 2021; Widodo & Winarti, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hamdi (2014:105) mengatakan indikator dari implementasi kebijakan akan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Gambaran tersebut berkaitan dengan dinamika produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Secara ringkas, indikator implementasi kebijakan dapat di kemukaan pada tabel berikut:

Indikator Implementasi Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah pencapaian kelompok sasaran
	Linearitas	Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana, dan teknologi)

Selanjutnya menurut Hamdi (2014:106) mengatakan pada sisi lain, determinan implementasi kebijakan publik menunjukkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Determinan tersebut berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sejalan dengan Nenobais dan Sarbini (2020) penelitian tentang "Policy

Implementation” dalam bahasa Indonesia “Implementasi Kebijakan” mengemukakan: “faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi yaitu: sasaran kebijakan, Sumber Daya dan Dana, Kualitas Hubungan antar Organisasi, Organisasi

penyelenggara lainnya yang berkaitan, politik, sosial dan ekonomi dan Sikap Operator.

Secara skematis, determinan implementasi kebijakan tersaji pada tabel berikut:

Determinan Implementasi Kebijakan Publik

Variabel	Indikator
Substansi Kebijakan	Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain
Perilaku Tugas Pelaksana	Motivasi kerja Kecenderungan penyalahgunaan wewenang Kemampuan pembelajaran
Interaksi Jejaring Kerja	Kerja sama antarpelaksana Hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan
Partisipasi Kelompok Sasaran	Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada
Sumber Daya	Kecukupan dana Ketersediaan pelaksana Kecukupan peralatan Ketersediaan informasi Ketepatan teknologi

Berdasarkan teori-teori implementasi kebijakan di atas dapat ditarik asumsi bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dibuat dalam bentuk tindakan atau keputusan dimana di dalamnya terdapat tujuan yang hendak dicapai yang menyangkut produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan yang peneliti gunakan adalah mengutip pendapat Hamdi yaitu 1)

Produktivitas dengan indikator: Jumlah pencapaian kelompok sasaran, 2) Linearitas dengan indikator: derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana), dan 3) Efisiensi dengan indikator: Tingkat pendayagunaan sumberdaya (pelaksana, aset, dana, dan teknologi).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (1982:32), adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa terkait dalam pengembangan ekonomi wilayah perbatasan antarnegara. Peneliti melakukan interaksi dengan para Informan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan AntarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Provinsi Riau secara mendalam, rinci dan tuntas.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan AntarNegara di PKSN Bengkalis dengan interpretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antarnegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pada penelitian ini, instrumen yang akan digunakan terkait dengan pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta data yang ingin dikumpulkan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa objek diantaranya di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan PKSN Bengkalis, yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Kebijakan pemerintah atau yang sering disebut sebagai kebijakan publik, merupakan suatu hal yang umum dijumpai dan senyatanya adalah suatu gejala yang tak dapat dihindari pada kehidupan masyarakat modern. Menurut Muchlis Hamdi (2015:33) kebijakan publik merupakan hasil atau output dari penyelenggaraan pemerintahan, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Setiap warga Negara sepanjang proses kehidupannya, selalu dipengaruhi oleh pelbagai bentuk kebijakan publik, antara lain perijinan, peraturan, pajak dan distribusi, pelayanan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah ditetapkannya PKSN Bengkalis di Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional Bengkalis yang terdiri dari 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan penelitian Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Bengkalis, di jelaskan dalam beberapa tahap dengan mengacu pada kajian teoritis, hasil wawancara, pengumpulan dokumen dan data di lapangan.

Keseluruhan program kegiatan dengan status tidak sesuai target dan tidak terlaksana, seluruh Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk menyelesaikan pada tahun anggaran 2024 dengan rencana tidaklanjut yang telah disepakati dalam rapat-rapat koordinasi yang telah di

lakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai lembaga Koordinasi.

Pada tanggal 4 s.d. 7 Februari 2024, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan bersama dengan TIM dari, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah melaksanakan kunjungan lapangan pada dalam rangka Pegukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, berupaya untuk membangun kawasan perbatasan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah PKSN Bengkalis. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai kebijakan dirancang untuk menentukan kebijakan strategis yang tepat bagi pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan telah merumuskan 4 (empat) isu strategis pengelolaan perbatasan antar negara, yaitu isu: (1) pengelolaan batas wilayah negara (boundary/border line issues), (2) pengelolaan lintas batas (cross-border issues), (3) pembangunan kawasan perbatasan (frontier issues), dan (4) kelembagaan (institutional issues).

Hasil penelitian tentang Analisis Pengembangan Ekonomi di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa kondisi pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan perbatasan di negara tetangga. Dapat dilihat dari rendahnya pelayanan

infrastruktur seperti jalan darat dan jaringan perhubungan udara, teknologi informasi, jaringan komunikasi, energi, keamanan energi, dan sebagainya, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan negara.

Pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan di PKSN Bengkalis, sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan Rencana Aksi Tahunan yang diusulkan dari daerah kepada kementerian/lembaga terkait. BNPP sebagai pengelola kawasan perbatasan memonitoring segala kegiatan yang tercantum dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga kepada daerah, untuk membantu pertumbuhan ekonomi pada daerah perbatasan sekitar. Sementara itu faktor-faktor yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis, yaitu proses perencanaan wilayahnya, sinkronisasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap bagaimana pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sarana prasarana yang baik dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan tersebut.

Hambatan yang ditemui dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis, antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya sistem regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, lemahnya sistem regulasi yang mendorong investasi, belum efektifnya kerja sama perdagangan antar Negara, dan masih

adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga.

Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah, antara lain dengan melakukan evaluasi tahunan sebagai upaya menjawab hambatan yang ada pada pengembangan ekonomi serta melakukan kajian dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi S (2011), yang hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Purna Yudha dan Resa Ana Dina (2020), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan peluang besar negara tetangga. Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut diperlukan infrastruktur, transportasi, energi, sumber daya, telekomunikasi-informasi, kapasitas sumber daya lokal yang tangguh. Kerjasama antarnegara di perbatasan dapat mendukung peningkatan

infrastruktur dan memudahkan kolaborasi antar wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kawasan pengembangan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar Negara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Hambatan yang ditemui dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis, antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya sistem regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, lemahnya sistem regulasi yang mendorong investasi, belum efektifnya kerja sama perdagangan antar Negara, dan masih adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga.

Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah, antara lain dengan melakukan evaluasi tahunan sebagai upaya menjawab hambatan yang ada pada pengembangan ekonomi serta melakukan kajian dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi S (2011), yang hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan

perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Purna Yudha dan Resa Ana Dina (2020), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan peluang besar negara tetangga. Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut diperlukan infrastruktur, transportasi, energi, sumber daya, telekomunikasi-informasi, kapasitas sumber daya lokal yang tangguh.

Kerjasama antarnegara di perbatasan dapat mendukung peningkatan infrastruktur dan memudahkan kolaborasi antar wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kawasan pengembangan. Implementasi dari Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan AntarNegara di PKSN Bengkalis sudah memasuki Permasalahan besar yang terjadi saat ini di 5 (lima) Kecamatan dalam kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis meliputi masalah abrasi pantai yang senantiasa mengikis bibir pantai, sebagai kawasan pusat peredaran narkoba dan sebagai kawasan keluar masuknya TKI ilegal, tentunya hal tersebut memerlukan kebijakan pengembangan kawasan dan perhatian yang lebih khusus serta pemihakan dan prioritas pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lain".

Kabupaten Bengkalis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Presiden tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024 dan dapat menjadi entri poin tersendiri buat BNPP sehingga setiap usulan dari Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan benar-benar terakomodir dalam sebuah rencana aksi yang nyata. Sehingga masyarakat di kawasan perbatasan dapat juga merasakan sentuhan pembangunan.

Pengembangan kawasan perbatasan Negara adalah menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan, salah satunya dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak swasta sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan. Di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Kecamatan Bantan terdapat pelabuhan Internasional yang harus dikembangkan yakni Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja yang terletak di Desa Selat Baru merupakan jalur lintas luar Negeri diharapkan dapat menjadi Pos lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antarnegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan wilayah perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu dilihat dari

proses perencanaan wilayah, sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap bagaimana pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sarana prasarana yang baik dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan tersebut berjalan dengan baik.

Hambatan-hambatan dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis, antara lain, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya sistem regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, lemahnya sistem regulasi yang mendorong investasi, belum efektifnya kerja sama perdagangan antarnegara, dan masih adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga.

Strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan ekonomi kawasan perbatasan antarNegara di PKSN Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah, antara lain dengan melakukan evaluasi tahunan sebagai upaya menjawab hambatan yang ada pada pengembangan ekonomi, melakukan kajian dalam rangka mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, serta melakukan inovasi sebagai bentuk upaya meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pengembangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Adyatama, E. (2021, September 12). Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan. Tempo.Co

- <https://nasional.tempo.co/read/1505276/mahfud-md-mintapemerintah-daerah-waspada-kriminalitas-di-kawasan-perbatasan>
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Al Hafis, R. I. (2018). *Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis– Selat Malaka*. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Ardhana, I Ketut., et al. (2007). *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia*. Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rikena Cipta.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada.
- Bangun, B. H. (2017). *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52–63.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, Darwin., et al. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Dr. Rusmiyati, M.Hum., Mesy Faridah H, S.STP, MPA., Alma'arif, S.IP, MA., Afni Nooraini, S.IP, M.Si., 2022. *Manajemen Perbatasan*, CV Cendekia Press Anggota IKAPI No. 328/JBA/2018, ISBN: 978-623- 5466-12-5
- Dwijowijoto. (2013). *Kebijakan Publik dan Penerapannya*. Jakarta: Inti Media.
- Effendy, Khasan. (2016). *Memadukan Metode Kuantitatif*. Bandung: Prahasta.
- Gerston, L. N. (2014). *Public policymaking in a democratic society: A guide to civic engagement*. . Routledge.
- Hadiwijoyo, Suryo S. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis). Yogyakarta: Gaya media.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik "Proses, Analisis dan Partisipasi"* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanifah, Harsono. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grasindo
- Herdiansyah, Haris. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Nawawi. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.

- Kennedy P.S.J., 2018. Challenges of Indonesian Maritime Development, *Elixir International Journal, Elixir Economics* 114 (2018) 49657- 49662, ISSN: 2229-712x, Copernicus Indexed.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Mazmanian dan Sabatier, Paul. (2013). *Implementation And Public Policy* Alih Bahasa. Jakarta: Fokus Media.
- MIRZA, Mirza; AISYAH, Siti. Analisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2020, 1.1: 14-34.
- Modie, AE. (1963). *Geography Behind Politics*. London: Chinsoun University Library.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, M. M. (2021b). Analisis Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Kabupaten Nunukan). *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.26623/ijsp.v2i1.3192>
- Mulyawan, Rahman. Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah Perbatasan Antarnegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Sosial Politik*, 2012, 2.1: 85-112.
- Muzwardi, A., Muhammad, A. S., Awangga, R. M., & Rizaldi, A. (2020). Analisis jejaring Sosial untuk Manajemen Pengelolaan Perbatasanantara Negara. *Jurnal Agregasi*, 8(2), 168–187. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3231>
- Nawawi, Hadari. (2017). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Diah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Setiawan, Guntur. (2009). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Uber. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Soehartono, Irwan. (2018). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumardiman, A., Kehakiman, D., & Sumardiman, A. (2021). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. 1(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.voll1.3.560>
- Strauss, Anselm dan Corbin, (2016). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suratman, Edy. (2008). Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah. Pontianak: Utan Press.
- Suryabrata, Sumadi. (2016). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahir. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan. Makassar: Universitas Muhammadiyah
- Eka Purna Yudha dan Resa Ana Dina. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus : Ranai – Natuna).
- Kurniadi, Dendy. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarneegara: Memicu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat: Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
- Mirza dan Aisyah, Siti. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau: Jurnal Ilmu Adiministrasi
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, David Hizkia., et al. (2017). Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. Bali: Universitas Udayana.
- Thoha, Miftah. (2010). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Grasindo.
- Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian untuk Sripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Usman, Sunyoto. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Wahab, Solihin Abdul. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Baru.
- Walidin, Warul., et al. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Pres dan Pemerintahan Indonesia Universitas Terbuka.
- Nenobais, Harry dan Sarbini. Policy Implementation in Water Services. International Conference on Advanced Materuals and Technology Univercity of Prof. Dr. Moestopo (Beragama)